

# Hubungan Dinamika Sosial Ekonomi Wilayah dengan Interaksi Ruang Kawasan Perbatasan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara

Agung Striyo Nugroho<sup>1\*</sup>, R Rijanta<sup>1</sup>, Purwo Santoso<sup>2</sup>, Muh Aris Marfai<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

[agungstriyo@ugm.ac.id](mailto:agungstriyo@ugm.ac.id)\*

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

<sup>3</sup>Badan Informasi Geospasial, Indonesia

Informasi artikel	ABSTRAK
<i>Sejarah artikel</i>	Kawasan perbatasan negara memiliki posisi penting bagi kedaulatan negara. Pulau Sebatik merupakan salah satu kawasan perbatasan yang ditetapkan sebagai PKSN untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, beserta pusat pertumbuhan baru dalam bidang ekonomi. Makalah ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik, (2) mengidentifikasi aktivitas interaksi ruang yang dilakukan masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, (3) melakukan penilaian hubungan antara kondisi sosial-ekonomi wilayah Pulau Sebatik dengan interaksi ruang antar wilayah yang telah dilakukan masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan prinsip triangulasi data untuk mendapatkan akurasi data. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik deskriptif dan analisis spasial. Beberapa hasil penelitian yang dapat ditemukan adalah bahwa kawasan Pulau Sebatik masih memiliki ketergantungan terhadap wilayah lain, salah satunya terhadap wilayah negara tetangga. Hal ini menjadi anomali jika dikaitkan dengan fungsi kawasan perbatasan sebagai manifestasi kedaulatan negara.
Diterima : 16-12-2022	
Revisi : 10-02-2023	
Dipublikasikan : 06-03-2023	
<b>Kata kunci:</b> Perbatasan Pulau Sebatik Interaksi Ruang	
<b>Keywords:</b> Border Sebatik Island Spatial Interaction	<b>ABSTRACT</b> The state border area has an important position for state sovereignty. Sebatik Island is one of the border areas designated as PKSN for defense and security purposes, along with a new growth center in the economic sector. This paper aims to (1) identify the socio-economic conditions of the area in the Sebatik Island Border Area, (2) identify spatial interaction activities carried out by border communities on Sebatik Island in order to fulfill their daily needs, (3) assess the relationship between socio-economic conditions in Sebatik Island with spatial interactions between regions that have been carried out by the community. Data collected includes primary and secondary data. This study uses qualitative methods by applying the principle of data triangulation to get data aquration. Data analysis was performed using descriptive statistic and spatial analysis. Some research results can be fund is the Sebatik Island region still has a dependence on other regions, one of which is on the territory of neighboring countries. This becomes an anomaly if it is associated with the function of the border area as a manifestation of state sovereignty.

## Pendahuluan

Kawasan perbatasan di sebuah negara memiliki peranan penting dalam menjaga sebuah wilayah negara. Batas wilayah negara akan berpengaruh terhadap upaya sebuah negara dalam mengidentifikasi kedaulatan sebuah negara. Batas negara merupakan batas yang dikuasai negara yang merupakan pemisah unit regional geografi yang terdisiri aspek fisik, sosial dan budaya (Kase, 2020). Ketika batas wilayah negara masih bermasalah, maka kedaulatan sebuah negara juga akan bermasalah. Dalam menjaga wilayah perbatasan tidak hanya dibutuhkan penguasaan secara *de facto* tetapi juga penguasaan secara *de jure* (Azmi, 2011). Pentingnya batas wilayah negara kemudian mengharuskan pengelolaan bukan hanya pada aspek garis batas saja, melainkan diperluas sampai pada konteks kawasan. Kedaulatan di lokasi ini juga dipengaruhi oleh kondusivitas kawasan perbatasan. Kesejahteraan masyarakat menjadi faktor utama, hal ini dikarenakan masyarakat perbatasan menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan wilayah negara. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan perbatasan diarahkan keseimbangan antara prosperity (kesejahteraan), security (keamanan) dan lingkungan (Istijono, 2012). Dengan demikian pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya menggunakan perspektif geografis saja tetapi juga secara sosial karena mereka menempati wilayah perbatasan (Bangun, 2017).

Pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia telah diamanahkan oleh Undang-Undang No 26 Tahun 2007. Pada aturan tersebut, beberapa kawasan perbatasan yang dinilai strategis ditetapkan sebagai PKSNI (Pusat Kegiatan Strategis Nasional). PKSNI ini berfungsi untuk kepentingan menjaga kedaulatan negara melalui aspek pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di lokasi tersebut. Disamping itu, amanah lain juga muncul melalui Undang - Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pada aturan perundangan ini, kawasan perbatasan dinilai strategis

dalam mengidentifikasi batasan wilayah negara Indonesia, serta pengelolaannya dinilai penting dalam rangka menjaga kedaulatan negara.

Pulau Sebatik yang berlokasi di Kalimantan Utara merupakan kawasan perbatasan yang berbatasan langsung Negara Malaysia di Negara Bagian Sabah. Wilayah ini berhadapan langsung dengan kota terbesar kedua di Sabah yaitu Kota Tawau. Tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga kedaulatan kawasan perbatasan agar masyarakat Pulau Sebatik tidak banyak bergantung pada Kota Tawau dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Secara politik, ketergantungan tersebut akan mengurangi kedaulatan sebuah negara, akan tetapi disisi lain, secara wilayah interaksi ruang antar wilayah merupakan hal yang biasa karena menerapkan asas komplementaritas atau saling melengkapi. Bagaimana memposisikan pengelolaan kawasan perbatasan di sebatik disatu sisi tetap mempertahankan prinsip kedaulatan negara, tetapi disisi lain memanfaatkan interaksi wilayah sebagai potensi perkembangan wilayah?. Oleh karena itu, perlu pemahaman tentang perkembangan sosial-ekonomi wilayah di Pulau Sebatik yang mempengaruhi daya dorong dan daya tarik masyarakat untuk berinteraksi dengan wilayah negara tetangga atau dengan wilayah lain di dalam negeri. Hal ini fungsikan agar dapat menilai seberapa mandiri kawasan perbatasan Pulau Sebatik dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kajian yang dilakukan oleh Sudiar (2012) menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan Pulau Sebatik belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bertempat tinggal disana.

Upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial pada suatu wilayah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Pengamatan atau penilaian kesejahteraan sosial di suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang digunakan

dalam penilaian atau pengamatan kesejahteraan sosial suatu wilayah dapat berupa Indeks Kualitas Hidup (IKH), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Koefisien Gini, dan sebagainya.

Indeks Kualitas Hidup merupakan konsep yang berhubungan dengan keseluruhan kesejahteraan dalam suatu masyarakat (Muta ali, 2015). Indikator utama yang digunakan pada perhitungan IKH ini yaitu angka tingkat kematian bayi (*infant mortality rate*), angka harapan hidup saat usia satu tahun, dan angka melek huruf.

Terlepas dari indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah, pembangunan manusia suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh beberapa elemen. UNDP menetapkan bahwa ada empat elemen utama yang berperan dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan (Setiawan & Hakim, 2013). Indeks Pembangunan Manusia juga menjadi salah satu faktor yang digunakan untuk melihat perbedaan antar wilayah. Kajian yang dilakukan oleh Hammidah et al (2022) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan perbedaan wilayah yaitu penduduk, indeks pembangunan manusia dan Produk Domestik Regional Bruto.

Todaro dan Smith (2003, dalam Arsyad, 2014) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Penilaian perkembangan ekonomi wilayah dapat dilihat melalui basis ekonomi, sektor unggulan, dan distribusi spasial aktivitas ekonomi (Muta ali, 2015).

Tujuan dari kajian ini adalah (1) Mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik,

(2) Mengidentifikasi aktivitas interaksi ruang yang dilakukan masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, (3) Melakukan penilaian hubungan antara kondisi sosial-ekonomi wilayah Pulau Sebatik dengan interaksi ruang antar wilayah yang telah dilakukan masyarakat. Kemanfaatan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengelolaan kearah yang tepat berdasarkan karakteristik wilayahnya. Disamping itu, secara eksplisit bahwa pengetahuan tersebut dijadikan dasar dalam menilai seberapa tinggi potensi Pulau Sebatik dalam mewujudkan kedaulatan negara di kawasan perbatasan. Selain itu, apakah kawasan perbatasan di Pulau Sebatik ini memiliki potensi dalam memanfaatkan interaksi antar ruang dalam rangka pembangunan wilayah. Azas saling melengkapi atau komplementaritas dapat terwujud dengan mengarahkan perkembangan wilayah Pulau Sebatik untuk memanfaatkan kebutuhan wilayah di wilayah tetangga maupun wilayah lain di dalam negeri.

## Metode

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pulau Sebatik. Lokasi penelitian tidak meliputi seluruh Pulau Sebatik, tetapi difokuskan pada wilayah Sebatik Pesisir Timur yang meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur, dan Kecamatan Sebatik Utara. Ketiga kecamatan tersebut secara administratif termasuk ke dalam Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi penelitian meliputi 11 desa, yaitu Desa Padaidi, Sungai Manurung, Tanjung Karang, dan Balansiku (Sebatik); Desa Tanjung Harapan, Sungai Nyamuk, Bukit Aru Indah, dan Tanjung Aru (Sebatik Timur); serta Desa Seberang, Lapri, dan Pancang (Sebatik Utara).

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah satuan administrasi kecamatan yang tersusun dalam satuan kawasan pengembangan. Satuan administrasi kecamatan tersebut digunakan sebagai representasi dari interaksi ruang masyarakat

yang berada di kawasan perbatasan. Objek penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung dalam satuan administrasi kecamatan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari beberapa sumber, diantaranya dari data Potensi Desa (PODES), data kebijakan tata ruang dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, dan data sekunder penunjang lainnya dari BPS. Data primer dikumpulkan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur melalui telepon untuk mengidentifikasi interaksi ruang masyarakat di kawasan perbatasan. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik deskriptif dan pemetaan menggunakan teknologi sistem informasi geografi (SIG).

## Hasil dan pembahasan

### *Kondisi sosial ekonomi*

Pemahaman mengenai karakteristik kondisi sosial dan ekonomi Pulau Sebatik dapat diamati dari analisis kondisi kependudukan, analisis pola pemukiman, dan analisis hasil produksi perekonomian desa-desa di Pulau Sebatik. Pada riset ini terdapat tiga kecamatan yang dijadikan sebagai acuan untuk mengamati kondisi sosial ekonomi di Pulau Sebatik, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur, dan Kecamatan Sebatik Utara. Kondisi kependudukan Pulau Sebatik dapat dilihat melalui distribusi penduduk yang ada di beberapa kecamatan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik tahun 2021 pada Tabel 1, diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi di Pulau Sebatik terdapat di Kecamatan Sebatik Timur dengan jumlah penduduk mencapai 14.171 jiwa dan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sebatik dengan jumlah penduduk hanya 6.453 jiwa. Adapun jumlah keseluruhan penduduk dari ketiga kecamatan tersebut mencapai 28.418 jiwa.

Tiga kecamatan yang digunakan sebagai wilayah riset ini terdiri dari 11 desa, yaitu 4 desa di Kecamatan Sebatik, 4 desa di Kecamatan Sebatik Timur, dan 3 desa di Kecamatan Sebatik Utara. Kondisi kependudukan dari 11 desa tersebut dapat diamati melalui distribusi penduduk yang tergambar pada Tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut jumlah penduduk tertinggi berada di Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur dan jumlah penduduk terendah berada di Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik. Kecamatan Sebatik Timur yang menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk yang tertinggi atau terbanyak pada tahun 2021 memiliki distribusi penduduk setiap desa yang tergolong merata jika dibandingkan dengan desa-desa yang terdapat di kecamatan lain. Hal tersebut terbukti dengan desa-desa di Kecamatan Sebatik Timur yang memiliki selisih jumlah penduduk relatif rendah apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di desa-desa kecamatan lain, dimana hanya Desa Sungai Nyamuk saja yang memiliki selisih jumlah penduduk di atas seribu jiwa di Kecamatan Sebatik Timur.

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Sebatik (jiwa) tahun 2020

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Sebatik	6453
Sebatik Timur	14171
Sebatik Utara	7794
<b>Jumlah</b>	<b>28418</b>

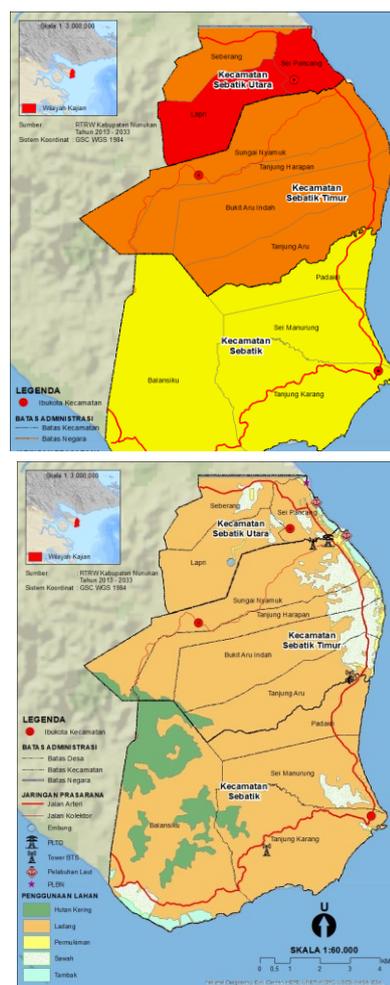
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2021

**Tabel 2** Jumlah Penduduk di Lokasi Penelitian tahun 2021

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
Sebatik	Balansiku	1415	23,58	60,01
	Tanjung Karang	3335	13,23	252,08
	Sei Manurung	1057	8,22	128,59
	Padaidi	930	5,73	162,30
Jumlah		6773	50,76	505,6
Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	5488	14,00	392,00
	Tanjung Harapan	2769	8,49	326,15
	Bukit Aru Indah	3344	9,55	350,16
	Tanjung Aru	2427	7,25	334,76
Jumlah		14028	39,29	1306,55
Sebatik Utara	Lapri	1301	1,32	985,61
	Pancang	5164	7,08	729,38
	Seberang	1313	5,21	252,02
<b>Jumlah</b>		<b>7778</b>	<b>13,61</b>	<b>1756,97</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2022

Distribusi penduduk di 11 desa tersebut memberikan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda beda di setiap desanya, dimana kepadatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Gambar 1, tingkat kepadatan penduduk yang tersebar di 11 desa terbagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu Tinggi (358-986 jiwa/km<sup>2</sup>), Sedang (196-394 jiwa/km<sup>2</sup>), dan Rendah (60-195 jiwa/km<sup>2</sup>). Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi terdapat pada Kecamatan Sebatik Utara yang meliputi Desa Lapri dan Desa Pancang. Kepadatan tinggi tersebut disebabkan oleh kurang meratanya distribusi penduduk yang terdapat di Kecamatan Sebatik Utara, dimana selisih jumlah penduduk antar desanya cukup tinggi, terutama antara Desa Pancang dengan desa lainnya yang berkisar 3000 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk sedang dapat dilihat pada seluruh desa yang berada di Kecamatan Sebatik Timur dan beberapa desa di Kecamatan Sebatik Utara. Tingkat kepadatan sedang tersebut dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Sebatik Timur, dimana meskipun distribusi penduduk di Kecamatan Sebatik Timur yang cenderung merata tetapi perbandingan jumlah penduduk di setiap desanya dengan



**Gambar 2.** Peta penggunaan lahan wilayah (sumber : olah data peneliti, 2020)

luas desanya menghasilkan angka yang termasuk klasifikasi sedang. Tingkat kepadatan penduduk rendah dapat dilihat pada seluruh desa di Kecamatan Sebatik. Rendahnya tingkat kepadatan tersebut disebabkan jumlah penduduk yang tinggal di desa yang berada Kecamatan Sebatik cenderung lebih sedikit daripada desa yang berada di Kecamatan Sebatik timur dan Sebatik Utara. Selain itu, luas wilayah desa yang berada di Kecamatan Sebatik cenderung lebih luas daripada desa-desa yang berada di Kecamatan Sebatik Timur dan Sebatik Utara. Hal tersebut berakibat pada hasil perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah desa di Kecamatan Sebatik termasuk pada klasifikasi rendah.

Pola permukiman yang terbentuk pada ketiga kecamatan yang digunakan sebagai wilayah kajian tergambar pada Gambar 2. Berdasarkan peta tersebut, bentuk pola permukiman yang terdapat di Pulau Sebatik berbeda di setiap kecamatannya. Secara umum pola permukiman yang tergambar pada Kecamatan Sebatik adalah pola permukiman menyebar, dimana pola tersebut membentuk kelompok-kelompok kecil permukiman yang tersebar di sekitar persawahan dan jalan arteri. Pola permukiman yang tergambar di Kecamatan Sebatik Timur adalah pola permukiman memanjang mengikuti garis pantai Pulau Sebatik. Pola Permukiman di Kecamatan Sebatik Utara memiliki dua pola permukiman yaitu pola permukiman menyebar di sekitar embung dan persawahan serta pola permukiman memanjang mengikuti garis pantai. Pola-pola permukiman yang tergambar pada tiga kecamatan di Pulau Sebatik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi aktivitas sosial ekonomi masyarakat sekitar, kondisi alam, dan persebaran fasilitas pendukung permukiman di Pulau Sebatik. Aktivitas sosial ekonomi masyarakat sekitar Pulau Sebatik sebagian besar berupa interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat dari luar Pulau Sebatik terutama pada wilayah Tawau,

Malaysia. Tingginya interaksi tersebut berakibat pada pola permukiman yang terbentuk, dimana untuk mempermudah interaksi tersebut masyarakat akan cenderung membangun pemukiman di sepanjang garis pantai Pulau Sebatik yang tingkat aksesibilitasnya lebih baik dan jarak yang lebih dekat. Hal tersebut dibuktikan dengan kecenderungan pola permukiman di tiga kecamatan tersebut yang berada di sekitar garis pantai Pulau Sebatik. Kecenderungan pola permukiman di sepanjang garis pantai juga terjadi di beberapa wilayah sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Aguspriyanti et al (2022) dimana pola permukiman masyarakat di wilayah pesisir cenderung mengikuti garis pantai karena memberikan kemudahan, akses cepat terhadap perairan serta mendukung profesi masyarakat.

Kondisi alam wilayah Sebatik yang masih didominasi oleh ladang dan persawahan dengan tanah yang subur juga berpengaruh pada pola permukiman yang terbentuk. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan permukiman di tiga kecamatan tersebut yang berada di sekitar persawahan dan ladang.

Berdasarkan Gambar 2 dapat diamati juga bahwa persebaran fasilitas pendukung permukiman di Pulau Sebatik sangat berpengaruh pada pola permukiman yang terbentuk di Pulau Sebatik. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan sebagian besar permukiman di tiga kecamatan tersebut yang cenderung berada di dekat atau sepanjang jalan arteri, ibukota kecamatan, pelabuhan, PLTD, dan Tower BTS. Fenomena keberadaan permukiman tersebut didasari oleh pentingnya fasilitas pendukung permukiman tersebut untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat sekitar, terutama fasilitas pendukung yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang menjadi indikator dasar kondisi sosial ekonomi suatu wilayah.

Analisis kondisi sosial ekonomi di Pulau Sebatik melalui hasil produksi perekonomian desa di tiga kecamatan kajian dapat dilihat melalui berbagai indikator yang meliputi

lapangan usaha yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di desa, jenis komoditas/sub sektor utama sebagian besar penduduk di desa, dan keberadaan produk unggulan/ utama desa. Berdasarkan data potensi desa tahun 2018, diketahui bahwa lapangan usaha yang menjadi sumber penghasilan masyarakat di desa-desa yang berada di Pulau Sebatik didominasi oleh lapangan usaha di bidang pertanian, dimana

hal tersebut dapat diamati pada Tabel 3. Beberapa wilayah perbatasan dominan memiliki potensi wilayah pada sector pertanian. Kajian yang dilakukan oleh Samsul Ma'rif (2012) terkait dengan strategi pengembangan perdesaan di wilayah perbatasan Indonesia dan Ambenu juga menyebutkan bahwa pertanian menjadi salah satu potensi yang penting yang dikembangkan.

**Tabel 3.** Hasil produksi perekonomian desa di Pulau Sebatik

Kecamatan	Desa	Sumber Penghasilan Utama Masyarakat	Jenis Komoditas Utama	Jenis Produk Unggulan Pangan	Jenis Produk Unggulan Non-Pangan	Produk Unggulan Ekspor
Sebatik	Balansiku	Pertanian	Kelapa Sawit	Eby	-	Ada sebagian besar
	Tanjung Karang	Pertanian	Kelapa Sawit	Garam, Ikan Teri, Udang	-	Ada sebagian kecil
	Sei Manurung	Pertanian	Kelapa Sawit	Kelapa Sawit	-	Ada sebagian besar
	Padaidi	Pertanian	Kelapa Sawit	Kelapa Sawit	-	Ada sebagian besar
Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	Pertanian	Kelapa Sawit	-	-	-
	Tanjung Harapan	Pertanian	Kelapa Sawit	Kelapa Sawit	-	Ada sebagian besar
	Bukit Aru Indah	Pertanian	Kelapa Sawit	Kopek Ikan Teri	Perahu Kayu	Ada sebagian besar
	Tanjung Aru	Pertanian	Kelapa Sawit	Kelapa Sawit	-	Ada sebagian besar
Sebatik Utara	Lapri	Pertanian	Kelapa Sawit	Pisang	-	Ada sebagian besar
	Pancang	Pertanian	Perikanan Tangkap	Amplang	Kreativitas Cinderamata	Ada sebagian besar
	Seberang	Pertanian	Kelapa Sawit	-	-	-

Sumber: Data Potensi Desa, 2018

Dominasi bidang pertanian yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat yang berada di Pulau Sebatik

tersebut tentu memberikan pengaruh pada penggunaan lahan yang terdapat di tiga kecamatan di Pulau Sebatik yaitu Kecamatan Sebatik, kecamatan Sebatik Timur dan

Kecamatan Sebatik Utara, dimana pada Gambar 2 terlihat hampir sebagian besar pemanfaatan lahan di tiga kecamatan tersebut didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Dominasi bidang pertanian tersebut juga juga memberikan efek pada komoditas utama pada desa-desa di Pulau Sebatik, dimana sebagian besar komoditas utama adalah perkebunan kelapa sawit yang tersebar di setiap desa di kecamatan Sebatik, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara. Kecuali satu desa di Kecamatan Sebatik Utara yang memiliki komoditas utama berupa perikanan tangkap. Perkebunan kelapa sawit yang menjadi komoditas utama tersebut mampu memberikan pemasukan terbesar pada desa-desa di Kecamatan Sebatik, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara. Berdasarkan Tabel 4,

diketahui bahwa pendapatan yang didapat dari sektor kelapa sawit mencapai Rp. 106.928.764.834,15 rupiah, dimana pendapatan tersebut jauh lebih besar dari pendapatan desa yang berasal dari komoditas pertanian lainnya seperti kakao, kelapa dalam, dan sawah.

Komoditas utama pada Kecamatan Sebatik, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara yang berupa kelapa sawit memberikan pengaruh pada produk unggulan wilayah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya komoditas kelapa sawit yang menjadi produk unggulan di beberapa desa di Kecamatan Sebatik, Sebatik Timur, dan Sebatik utara seperti di Desa Sei Manurung, Desa Padiadi, Desa Tanjung Harapan, dan Desa Tanjung Aru.

**Tabel 4.** Komoditas utama wilayah kajian bidang pertanian

Jenis Komoditas	Perkiraan Luas Eksisting (ha)	Produksi (ton/hektar /tahun)	Harga (per ton)	Potensi Nilai Produktivitas (hektar/tahun)	Estimasi pendapatan seluruh lahan per tahun
Kelapa Sawit	8910,73	15	Rp 800.000	Rp 12.000.000	Rp 106.928.764.834
Kakao	182.19	4	Rp 15.000.000	Rp 60.000.000	Rp 10.931.114.481
Kelapa Dalam	48.62	3.5	Rp 2.400.000	Rp 8.400.000	Rp 408.379.234
Sawah	348,76	7	Rp 10.000.000	Rp 70.000.000	Rp 24.412.881.327

Sumber: Survei Lapangan, 2019

### Interaksi Ruang Wilayah

Ketersediaan fasilitas merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi terjadinya interaksi ruang wilayah. Apabila ketersediaan fasilitas yang ada di suatu wilayah belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk pada wilayah terkait, maka akan timbul kecenderungan dari penduduk untuk memenuhi kebutuhannya dari wilayah lain. Fasilitas pada suatu wilayah seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan fasilitas umum lainnya memiliki standar minimum jumlah penduduk yang dapat dilayani

(*threshold*). Nilai standar tersebut akan menunjukkan kemampuan fasilitas dalam melayani penduduk yang ada pada suatu wilayah. Jumlah fasilitas pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA telah ada dan sudah mampu melayani kebutuhan seluruh penduduk yang ada di masing-masing kecamatan. Adapun kebutuhan akan SMK di Kecamatan Sebatik Utara belum terpenuhi. Begitu pula dengan kebutuhan akan perguruan tinggi pada wilayah Sebatik. Kebutuhan akan perguruan tinggi belum mampu dipenuhi secara mandiri

karena tidak adanya sarana pendidikan tinggi di Sebatik.

Fasilitas kesehatan terdiri dari rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu, dan balai pengobatan. Jumlah fasilitas kesehatan berupa Puskesmas yang telah ada sudah mampu melayani kebutuhan seluruh penduduk yang ada di masing-masing kecamatan. Adapun puskesmas pembantu hanya tersedia di Kecamatan Sebatik. Fasilitas rumah sakit tipe D baru dibangun pada tahun 2020 dan hanya berada di Kecamatan Sebatik.

Fasilitas ekonomi terdiri dari pasar, supermarket, toko, bank, dan KUD. Jumlah fasilitas ekonomi berupa supermarket, dan toko yang telah ada sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan ekonomi pada masing-masing kecamatan. Adapun fasilitas pasar belum tersedia di Sebatik Timur,

fasilitas bank belum tersedia di Sebatik Utara, serta fasilitas KUD belum tersedia di Sebatik Timur dan Sebatik Utara. Jumlah penduduk di Kecamatan Sebatik Utara memang belum memenuhi ketentuan minimum untuk disediakannya pelayanan fasilitas ekonomi berupa bank. Oleh sebab itu, kebutuhan pelayanan dari masyarakat Sebatik Utara terhadap bank dapat dipenuhi dari wilayah lain seperti Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik. Adapun fasilitas pelayanan KUD seharusnya tersedia pada setiap kecamatan karena jumlah penduduk pada setiap kecamatan telah memenuhi ketentuan minimum untuk disediakannya pelayanan fasilitas ekonomi berupa KUD, namun Kecamatan Sebatik Timur dan Sebatik Utara belum memiliki fasilitas pelayanan tersebut,

**Tabel 5.** Perbandingan harga bahan pokok Malaysia-Indonesia

<b>Bahan Pokok</b>	<b>Harga Produk Malaysia</b>	<b>Harga Produk Indonesia</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Preferensi Produk</b>
Beras	Rp 9.800/kg	Rp 10.500/kg	Produk Indonesia dinilai memiliki kualitas yang lebih baik	Indonesia
Gula Pasir	Rp 13.000/kg	Rp 13.000/kg	Gula pasir Indonesia berwarna cokelat, tidak seputih gula pasir Malaysia	Malaysia
Minyak Goreng	Rp 13.000/kg	Rp 16.000/kg	Merk Indonesia yang masuk adalah Bimoli	Malaysia
Daging Sapi	-	-	Suplai rendah	-
Daging Ayam	Rp 21.000/bagian	-	Penyuplai daging Indonesia belum memiliki pendingin, sehingga transport daging buruk	Malaysia
Telur	Rp 47.000/30 butir	Rp 50.000/30 butir	Telur Indonesia sudah tangan ketiga, transport juga menyebabkan potensi kerusakan telur dari luar pulau lebih besar, sehingga tidak disukai	Malaysia
Susu	Rp 23.000/kg	-	Hanya tersedia susu dari Malaysia	Malaysia
Jagung	-	-	Suplai rendah	-
Gas LPG	Rp 200.000 (12 kg)	Rp 21.000 (3 kg)	Preferensi pembeli bergantung kebutuhan pemakaian	

Sumber: Survei Lapangan, 2018

Interaksi yang terjadi antara masyarakat Pulau Sebatik dan masyarakat Malaysia telah terjadi sejak lama. Interaksi tersebut terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari

aspek sosial hingga ekonomi. Interaksi pada aspek ekonomi masyarakat Pulau Sebatik dan masyarakat Malaysia merupakan jenis interaksi yang paling sering terjadi. Salah

satunya adalah interaksi ekonomi yang berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat dari kedua daerah tersebut. Berdasarkan hasil survei lapangan, terdapat banyak sekali produk Malaysia yang dipasarkan ke Sebatik dan menjadi produk yang selalu digunakan oleh masyarakat Sebatik. Produk-produk tersebut diantaranya berupa bahan pokok yang merupakan kebutuhan utama. Tabel 5 menyajikan perbandingan harga antara bahan pokok produksi Indonesia dan Malaysia yang ada di Sebatik serta preferensi masyarakat Sebatik dalam membeli produk bahan pokok.

Berdasarkan Tabel 5, preferensi pilihan produk bahan pokok masyarakat Sebatik didominasi oleh produk dari Malaysia. Produk Malaysia dipilih karena kualitasnya yang lebih baik dan harga yang jauh lebih terjangkau serta ketersediaan bahan pokok dari Malaysia yang cukup banyak sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk di wilayah Sebatik. Gula pasir dari Malaysia merupakan salah satu yang paling banyak dibeli oleh penduduk di wilayah Sebatik. Preferensi tersebut disebabkan oleh kualitas gula pasir Malaysia lebih bersih dan putih dibandingkan dengan Indonesia. Gula pasir dari Indonesia berwarna coklat dan cenderung tidak bersih. Produk minyak goreng dan telur dari Malaysia juga banyak dibeli atau digunakan oleh penduduk di wilayah Sebatik karena harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan produk dari Indonesia. Adanya perbedaan harga yang cukup tinggi antara produk Indonesia dengan Malaysia di wilayah Sebatik tersebut disebabkan oleh faktor ketersediaan barang yang langka dan biaya pengiriman yang mahal. Preferensi daging wilayah Sebatik hingga saat ini masih didominasi oleh produk daging dari Malaysia. Preferensi tersebut disebabkan oleh penggunaan teknologi pembekuan yang baik pada produk daging Malaysia, sehingga daging dari Malaysia lebih diminati oleh pedagang karena mampu bertahan lama. Namun, ada pula produk Indonesia yang lebih dipilih oleh penduduk di

Sebatik, yaitu beras. Beras Indonesia dinilai memiliki rasa yang lebih lezat jika dibandingkan dengan beras dari Malaysia. Rasa menjadi faktor utama yang mempengaruhi preferensi masyarakat Sebatik terhadap beras produksi Indonesia. Walaupun dari segi harga dan keawetan beras Indonesia dinilai tidak sebaik beras Malaysia, penduduk tetap memiliki preferensi untuk memilih beras produksi Indonesia.

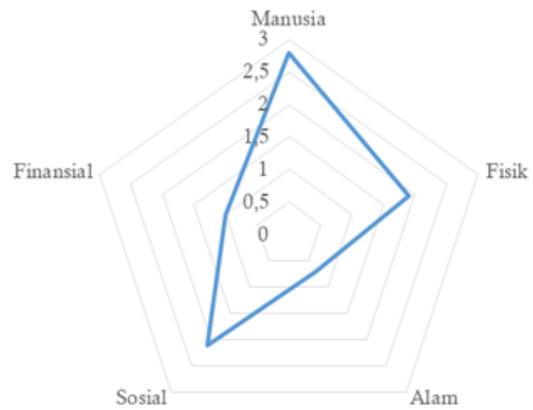
Interaksi ekonomi yang terjadi antara masyarakat Pulau Sebatik dan masyarakat Malaysia tidak terbatas pada aspek pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi, mencakup juga aspek penjualan hasil sumberdaya alam dari masyarakat Pulau Sebatik. Banyak petani dan pengumpul hasil bumi berupa kelapa sawit, kakao, kopi, dan pisang atau hasil tangkapan ikan warga Sebatik yang dijual ke Tawau menggunakan kapal kayu besar melintasi Sungai Pancang dengan memanfaatkan jaringan para pedagang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan para pedagang di Tawau, Malaysia (Ghafur, 2016). Selain itu, sebagian kecil masyarakat Pulau Sebatik juga ada yang bekerja sebagai pekerja migran di wilayah Malaysia.

Tingginya interaksi yang terjadi antara masyarakat Pulau Sebatik dengan masyarakat di dalam atau luar dari Pulau Sebatik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penghidupan di setiap rumah tangga memberikan pengaruh terhadap karakteristik penghidupan masyarakat Pulau Sebatik. Karakteristik penghidupan masyarakat Pulau Sebatik tersebut dapat diamati dan dinilai menggunakan analisis pentagon aset rumah tangga, dimana aset rumah tangga tersebut terdiri dari aset kemanusiaan, alam, finansial, sosial dan fisik. Seluruh aset yang dimiliki tersebut kemudian dipetakan untuk mengetahui pola kepemilikan aset yang digunakan dalam penghidupan masyarakat. Setyaningrum & Nugroho (2022) dalam studinya terkait dengan strategi penghidupan berkelanjutan juga menggunakan analisis pentagon aset untuk mengidentifikasi karakteristik penghidupan dari masyarakat

komunitas pengolah ikan. Analisis pentagon asset dapat memberikan penilaian terkait dengan asset modal yang paling dominan dan kurang dominan sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi penghidupan yang berkelanjutan. Ada delapan mata pencaharian sampel yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis, yaitu petani padi, petani kelapa sawit dan kakao, buruh tani, nelayan perikanan tangkap, buruh budidaya rumput laut, jasa rental mobil, staf perangkat desa, dan guru.

Berdasarkan hasil penskalaan nilai aset, didapatkan hasil pada grafik di bawah. Aset dengan nilai yang paling besar adalah Modal Manusia. Hal tersebut disebabkan jumlah anak berpendidikan sarjana atau sedang menempuh kuliah dan lulus SMA memiliki jumlah yang relatif merata di setiap wilayah kajian. Selain itu, Modal Sosial juga memiliki nilai yang cukup besar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa interaksi yang telah dilakukan oleh masyarakat Pulau Sebatik memiliki pengaruh terhadap kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup dan aset masyarakat. Nilai Modal Sosial yang cukup tinggi tersebut kemudian mampu menjadi modal yang baik untuk perkembangan ekonomi dan sosial dari masyarakat Pulau Sebatik. Namun, modal sosial tersebut juga

dapat memberikan ancaman bagi ketahanan sosial masyarakat jika memunculkan ketergantungan masyarakat Pulau Sebatik dengan wilayah Malaysia.



**Gambar 4.** Grafik pentagon aset masyarakat Sebatik di wilayah kajian (sumber : olah data, 2020)

### Hubungan antara Kondisi Sosial Ekonomi dan Interaksi Ruang

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi sosial-ekonomi wilayah dan interaksi ruang, ditemukan bahwa beberapa kondisi memiliki hubungan sebagai berikut pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Hubungan antara kondisi sosial-ekonomi dan interaksi ruang wilayah

		<b>Interaksi Ruang dalam rangka</b>		
		<b>Pemenuhan Fasilitas Pendidikan</b>	<b>Pemenuhan Fasilitas Kesehatan</b>	<b>Pemenuhan Fasilitas Ekonomi</b>
<b>Kondisi Sosial-Ekonomi</b>	<b>Distribusi Penduduk</b>	Kecamatan dengan jumlah penduduk yang tinggi memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang lebih banyak. Secara umum, kebutuhan fasilitas pendidikan dasar dan menengah telah mampu dipenuhi secara mandiri. Namun, kebutuhan akan fasilitas pendidikan tinggi hanya dapat dipenuhi dari luar wilayah.	Kecamatan dengan jumlah penduduk yang tinggi memiliki fasilitas kesehatan yang terbatas. Hal tersebut meningkatkan interaksi ruang yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan ke luar wilayah.	Kecamatan dengan jumlah penduduk yang tinggi memiliki jumlah fasilitas ekonomi lebih banyak. Beberapa fasilitas pelayanan ekonomi seperti bank, pasar, dan KUD belum tersedia di semua kecamatan, sehingga mendorong terjadinya interaksi ruang wilayah
	<b>Pola Permukiman</b>	Pola permukiman memanjang mengikuti jalan untuk memudahkan akses terhadap pemenuhan fasilitas pendidikan	Pola permukiman memanjang mengikuti jalan untuk memudahkan akses terhadap pemenuhan fasilitas kesehatan	Pola permukiman memanjang mengikuti jalan untuk memudahkan akses terhadap pemenuhan fasilitas ekonomi
	<b>Hasil Produksi</b>	-	-	Hasil produksi pertanian wilayah Sebatik banyak dijual dalam bentuk mentah ke wilayah Malaysia. Adapun preferensi kebutuhan pokok masyarakat wilayah Sebatik lebih banyak disuplai dari Malaysia
	<b>Tenaga Kerja</b>	-	-	Tenaga kerja masyarakat sebatik sebagian besar di bidang pertanian. Komoditas hasil pertanian masyarakat banyak yang dipasarkan ke wilayah luar Sebatik. Selain itu, sebagian masyarakat Sebatik juga banyak yang melakukan aktivitas migrasi ke Malaysia untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik sebagai pekerja migran

Jumlah penduduk di wilayah Sebatik belum memenuhi standar ketentuan minimum untuk penyediaan fasilitas pendidikan berupa akademi/perguruan tinggi. Kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat Sebatik yang hendak memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan tinggi perlu melakukan interaksi ruang dengan wilayah di luar Sebatik. Hal tersebut menunjukkan bahwa preferensi pemenuhan fasilitas pendidikan tinggi di Sebatik masih bergantung pada wilayah lain, sehingga menimbulkan adanya interaksi ruang wilayah

antara Sebatik dengan wilayah-wilayah luar yang memiliki fasilitas pelayanan pendidikan berupa perguruan tinggi. Fasilitas kesehatan yang ada di Sebatik masih sangat terbatas. Selain itu, fasilitas rumah sakit yang ada di Sebatik bertipe rumah sakit D yang hanya menyediakan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi, serta sebagai penerima rujukan dari puskesmas. Terbatasnya jumlah fasilitas kesehatan di Sebatik menyebabkan pasien dengan kondisi tertentu yang tidak dapat ditangani oleh rumah sakit di wilayah Sebatik harus dirujuk ke rumah sakit dengan

fasilitas yang lebih lengkap yang ada di Nunukan. Berdasarkan hasil wawancara, dalam beberapa kasus bahkan ada pasien yang dirujuk untuk dirawat di rumah sakit Malaysia. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa preferensi pelayanan masyarakat Sebatik terhadap fasilitas kesehatan yang lebih lengkap harus didapatkan dari luar wilayah Sebatik, sehingga menimbulkan interaksi ruang wilayah antara Sebatik dengan wilayah luar yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan lebih lengkap.

Beberapa fasilitas pelayanan ekonomi di wilayah Sebatik juga belum terdistribusi secara merata. Kecamatan Sebatik Timur belum memiliki pasar, Kecamatan Sebatik belum memiliki Bank, serta Kecamatan Sebatik Timur dan Sebatik Utara belum memiliki KUD. Kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat pada wilayah yang belum dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pelayanan ekonomi tersebut perlu melakukan interaksi ruang dengan wilayah-wilayah sekitarnya, dalam hal ini misalnya, masyarakat Sebatik Timur dapat mengakses pelayanan fasilitas pasar ke Kecamatan Sebatik atau Sebatik Utara dan masyarakat Sebatik dapat mengakses pelayanan bank ke Kecamatan Sebatik Timur atau Sebatik Utara. Adapun fasilitas pelayanan ekonomi berupa toko sudah mampu memenuhi kebutuhan pelayanan pada masing-masing kecamatan. Namun, preferensi masyarakat Sebatik terhadap kebutuhan bahan pokok yang diproduksi oleh Malaysia juga dapat memicu adanya interaksi ruang wilayah oleh pelaku usaha toko untuk membeli stok barang dagangan. Aktivitas ekonomi lain yang dilakukan oleh para petani atau nelayan dengan menjual hasil produksinya ke Tawau, Malaysia dalam bentuk barang mentah juga menjadi pemicu tingginya tingkat interaksi ruang wilayah antara Sebatik dan Malaysia. Selain itu, aliran pekerja migran dari Sebatik ke Malaysia juga turut mempengaruhi tingkat interaksi ruang wilayah antara Sebatik dan Malaysia. Kondisi ini hampir serupa dengan kajian yang dilakukan oleh Raharjo (2013)

dimana masyarakat di wilayah perbatasan Entikong-Malaysia juga sangat tergantung pada perdagangan yang ada di Malaysia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerawanan ekonomi (Raharjo, 2013).

Kaitannya dengan interaksi ruang antar wilayah, Putra et al (2017) dalam kajiannya terkait dengan sektor unggulan dan interaksi antar wilayah menunjukkan bahwa wilayah dengan penduduk yang besar dan berdekatan dengan pusat pertumbuhan cenderung memiliki interaksi antar wilayah yang tinggi. Interaksi ruang wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh keberadaan sarana prasarana, jumlah pendudukan, skala pelayanan dan kekuatan interaksi (Yusliana & Devi, 2020). Rendra & Fitriansyah (2020) juga menyebutkan bahwa pusat pelayanan memiliki peran yang penting dalam kaitannya dengan interaksi ruang wilayah, wilayah yang memiliki fasilitas yang lengkap kurang memiliki interaksi kuat dengan pusat pelayanan di wilayah lain. Pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi di Pulau Sebatik harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan juga agar tidak terjadi ketimpangan social ekonomi. Kondisi ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Rani (2012) yang menyebutkan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya difokuskan pada kemandirian Negara tetapi juga harus difokuskan pada pembangunan pelayanan social dan ekonomi untuk menghindari terjadinya gangguan stabilitas negara. Kajian lainnya yang dilakukan oleh Yudha & Dina (2020) terkait dengan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur baik itu transportasi, air, energi, telekomunikasi, sumber daya manusia dan kerjasama antar negara.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi sosial-ekonomi wilayah Sebatik, ditemukan bahwa wilayah Sebatik memiliki interaksi ruang dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Interaksi ruang yang saling

menguntungkan antara dua wilayah atau lebih adalah interaksi yang saling melengkapi (*complementary*). Namun, pada kasusnya interaksi ruang yang terjadi antara Sebatik dengan wilayah-wilayah lain adalah interaksi yang bersifat intervensi, khususnya dalam hal ekonomi. Artinya, wilayah yang berinteraksi dengan Sebatik menyediakan alternatif yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sebatik, sehingga terjadi *capital drain* dari Sebatik ke wilayah-wilayah lain. Masyarakat Sebatik masih memiliki ketergantungan terhadap produk bahan pokok dari Malaysia. Ketersediaan, harga, dan kualitas merupakan beberapa faktor yang menyebabkan produk bahan pokok dari Malaysia lebih diminati oleh masyarakat Sebatik. Kaitannya dengan interaksi ruang antara Sebatik dan Malaysia, peran Sebatik masih terbatas sebagai 'pasar' bagi negara tetangga dan belum mampu meningkatkan statusnya sebagai sesama pelaku yang saling menjual produk. Nilai tambah masyarakat petani di Sebatik juga belum mampu memberikan nilai tukar yang sepadan atas barang-barang yang masuk ke Pulau Sebatik. Belum ada produk yang mampu diekspor dari Sebatik dengan harga yang tinggi dan stabil. Kedepan perlu dilakukan kajian terkait dengan analisis kebutuhan dan sebaran infrastruktur pelayanan di Pulau Sebatik untuk mendukung kemandirian wilayah.

### Ucapan terima kasih

Ucapan Terima kasih patut kami haturkan kepada Fakultas Geografi UGM atas kepercayaan dan kesempatannya pada tahun 2020 ini mendapatkan hibah penelitian dosen mandiri. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada tim peneliti beserta asisten peneliti yang pada tahun 2019 telah memberikan kesempatan untuk ikut dalam penelitian di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Semoga dengan adanya *paper* ini, dapat memberikan referensi sederhana untuk perkembangan pengelolaan kawasan perbatasan di Pulau Sebatik.

### Referensi

- Aguspriyanti, C. D., Helen, & Sudiana. (2022). Kajian Bentuk Pola Persebaran Permukiman Pesisir Di Kecamatan Moro, Kepulauan Riau. *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 23(2), 33–40. <https://doi.org/10.26905/jam.v23i2.7460>
- Arsyad, L. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. In: *Konsep dan Pengukuran Pembangunan Ekonomi*. Repository Universitas Terbuka.
- Azmi. (2011). Kajian Arsip Wilayah Perbatasan Negara dalam Rangka Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Terjaga di Lingkungan Lemabaga Negara dan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kearsipan*, 6(12), 1–32.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. (2021). Kabupaten Nunukan dalam Angka 2021. In *BPS Kabupaten Nunukan*. <https://nunukankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=zwy3njvhmwnkzwy5odmxnte0otgzniw&xzmn=ahr0chm6ly9udw51a2fua2filmjwcy5nby5pzc9wdwjsawnhdglvbi8ymde4lza4lze2l2vmnzy1ytfjzgvmtogzmtuxndk4mzyymc9rywj1cgf0zw4tbnvudwthbi1kywxhbs1hbmmdrys0ymde4lmh0b>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. (2022). *Kecamatan Sebatik Barat dalam Angka*. BPS Kabupaten Nunukan. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. (2022). *Kecamatan Sebatik dalam Angka*. BPS Kabupaten Nunukan. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. (2022). *Kecamatan Sebatik Utara dalam Angka*. BPS Kabupaten Nunukan. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara : Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52–63.
- Ghafur, M. F. (2016). Ketahanan Sosial Di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik.

- Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 42(2), 233–248.
- Hamidah, A., Hari, W., Widodo, S., & Nurul, A. (2022). Study of Economic Inequality in The Agglomeration Region of Malang Raya. *Jurnal Spatial: Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 22(2), 145–153.
- Istijono, B. (2012). *Arah Kebijakan Menuju Kebijakan Yang Terarah Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan*. 1(1), 48–51.
- Kase, D. A. (2020). Wilayah Perbatasan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Proyuris*, 2(1), 169–184. <https://ejurnal.undana.ac.id/JP/article/download/3516/2332>
- Muta ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional: Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan (Ed. 1)*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Putra, M., Giyarsih, S. R., & Kurniawan, A. (2017). Sektor Unggulan dan Interaksi Antarwilayah pada Kawasan Strategis Nasional Perkotaan MEBIDANGRO. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 5(3), 181–187. <https://doi.org/10.14710/jwl.5.3.181-187>
- Raharjo, S. N. I. (2013). Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong). *Widyariset*, 16(1), 71–79.
- Rani, F. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. *Jurnal Transnasional*, 4(1), 1–17.
- Rendra, M. I., & Fitriansyah, H. (2020). Analisis Pusat Pelayanan Dan Interaksi Ruang Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Geografi*, 9(2), 73–82. <http://geografi.ppj.unp.ac.id/index.php/geo/article/view/1429>
- Samsul Ma'rif. (2012). Strategi Pengembangan Perdesaan Kawasan Perbatasan, Studi Kasus: Kawasan Perbatasan Republik Indonesia-Ambenu Republik Demokratik Timor Leste. *Tataloka*, 14(1), 75–89.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Manusia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26. Uny.ac.id
- Setyaningrum, A., & Nugroho, A. S. (2022). Strategi Penghidupan Berkelanjutan pada Komunitas Pengolah Ikan pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Kalurahan Poncosari, Kepanewon Srandakan, Bantul). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 17(1), 115–123. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v17i1.10737>
- Sudiar, S. (2012). Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 1(3), 389–402.
- Undang-Undang (UU) No 26 Tahun 2007. (2007). *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.
- Undang - Undang Nomor 43. (2008). Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. In *Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008*.
- Yudha, E. P., & Dina, R. A. (2020). Pengembangan Potensi Wilayah Kawasan Perbatasan Negara Indonesia (Studi Kasus: Ranai-Natuna). *Tata Loka*, 22(3), 366–378. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.3.366-378>
- Yusliana, & Devi, M. K. D. (2020). Interaksi Wilayah Pusat Pertumbuhan Melalui Pendekatan Skalogram dan Gravitasi di Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 4(2), 148–159. <https://doi.org/10.29408/geodika.v4i2.2721>